

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi Informasi saat ini berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen. Dalam bidang akuntansi, perkembangan teknologi informasi memiliki dampak yang sangat signifikan, baik pada organisasi bisnis maupun sektor publik. Menurut Kang (1998: 1) sistem teknologi informasi akan membantu perusahaan untuk memperbaiki kinerja organisasi hanya apabila perusahaan menggunakan sistem teknologi informasi secara aktual dalam langkah yang efisien.

Penerapan teknologi baru dalam suatu organisasi akan berpengaruh pada keseluruhan organisasi bisnis maupun sektor publik, terutama pada Sumber Daya Manusia. Penerapan teknologi ini juga turut dikembangkan pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah. Menurut Agoes (2012: 11-13) Pemeriksaan berdasarkan sistem ini dikembangkan agar tercapainya tiga prinsip manajemen dalam audit yaitu; ekonomis, efektivitas, dan efisiensi, prinsip ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat, prinsip efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, prinsip efisien disini adalah dengan biaya tertentu

dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Selain 3 prinsip manajemen ada pula prinsip tata kelola keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Prinsip Tata Kelola Keuangan Negara diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 dan UU No.1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Prinsip Tata Kelola Keuangan Negara berdasarkan pada tata tertib, taat peraturan, transparan, akuntabel, ekonomi, efisien, efektif, memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Selain itu, di dalam UU No.15 Tahun 2004 dan UU No.15 Tahun 2006 menyatakan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara diperiksa oleh BPK. Untuk menegakkan Prinsip Tata Kelola Keuangan Transparan dan Akuntabilitas tersebut, pemerintah berupaya dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Teknologi informasi tersebut dimanfaatkan oleh BPK RI dalam bidang audit khususnya dikalangan auditor yang berwenang dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini akan membantu auditor dalam mendapatkan laporan keuangan yang diperlukan dari seluruh entitas. Teknologi sistem yang dimaksud BPK RI disebut dengan *Electronic Audit (E-Audit)*.

Sistem *E-Audit* ini memberikan keuntungan bagi BPK selaku Auditor maupun *Auditee*. Sebagai auditor, pemeriksaan akan lebih efektif bila dilakukan dengan sistem *E-Audit*. Cakupan pemeriksaan akan lebih luas, biaya pemeriksaan akan lebih hemat, serta proses dan penyelesaian pemeriksaan akan lebih cepat, sedangkan sebagai *Auditee* sistem *E-Audit*,

dapat memberikan keuntungan seperti lebih menghemat waktu dalam menyediakan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang memerlukan pemeriksaan, serta kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Menurut komik BPK yang berjudul “Menenal BPK Lebih Dekat” melalui cergami menjelaskan bahwa dengan *E-Audit* pengumpulan informasi dan bukti awal serta evaluasi dilakukan dengan sistem komputerisasi, bukti-bukti awal yang dikumpulkan tidak lagi berbentuk *hardcopy* melainkan *file* data komputer. Ada banyak alasan BPK menerapkan *E-Audit* diantaranya karena jumlah entitas yang harus diperiksa oleh auditor sangat banyak dengan waktu pemeriksaan yang diberikan hanya terbatas. Menurut *Grand Design E-Audit* (2011: 113) dijelaskan bahwa konsep penerapan *E-Audit* ini muncul ketika melihat adanya kesenjangan antara jumlah entitas yang diperiksa, objek pemeriksaan, harapan *stakeholder* dengan sumber daya yang dimiliki BPK.

BPK memiliki keterbatasan dalam jumlah pemeriksanya. Di sisi lain, jumlah entitas yang diperiksa dan objek pemeriksaan begitu banyak. Ditambah tuntutan yang tinggi dari masyarakat dan *stakeholder* terhadap kinerja BPK. Jika *E-Audit* berhasil diterapkan, maka diyakini dapat memperkecil kesenjangan tersebut. Pemeriksaan BPK akan lebih efektif dan efisien. Keuntungan yang kurang lebih sama juga didapat entitas yang diperiksa BPK.

Seiring dengan hal itu, BPK juga mulai menjalin kesepakatan bersama dengan semua entitas yang diperiksa BPK dalam rangka pengembangan *E-Audit*. Intinya, BPK dan entitas yang diperiksa sama-sama bersepakat dalam mengembangkan sistem teknologi dan informasi di institusi masing-masing untuk mendukung penerapan *E-Audit*. Upaya BPK menjalin kesepakatan bersama ini hanya untuk mengatur tata caranya saja, Bukan meminta ijin. Sebab, berdasarkan amanat UUD No.45 dan peraturan perundang-undangan yang terkait keuangan negara, khususnya UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK. BPK memiliki kewenangan dalam meminta data yang diperlukan dan entitas yang diperiksa wajib menyerahkan data yang diminta.

Pemanfaatan teknologi dalam proses audit ini tidak terlepas dari persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan sistem serta kegunaan atau manfaat dari sistem itu sendiri. Davis dalam Nindyastuti (2014: 5). Dengan tertanamnya persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan sistem, dapat membuat penggunaan sistem secara meluas. Persepsi kemudahan diartikan sebagai suatu tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan sistem tertentu adalah mudah. Persepsi pengguna atas kemudahan sistem ini tidak lain adalah auditor.

Pada awalnya auditor tidak harus ahli dalam bidang komputer untuk keperluan auditnya. Namun sekarang, dengan kemajuan teknologi, seorang auditor tidak hanya harus ahli dalam bidangnya tetapi juga harus memiliki kemampuan tertentu di bidang komputer. Auditor dalam suatu perusahaan

berperan penting dalam memeriksa sistem informasi akuntansi pada perusahaan tersebut. Seorang Auditor harus dapat memastikan apakah sistem informasi itu sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya atau malah melenceng dari kebijakan perusahaan. Menurut Godhue dalam Septiningtyas (2010: 4) dikatakan bahwa keberhasilan suatu sistem informasi tergantung pada kemudahan dan pemanfaatan pemakai sistem terhadap teknologi yang ada dalam sistem karena teknologi akan membantu individu dalam menyelesaikan tugasnya.

Sebagai Lembaga Negara yang berbasis kerja pemeriksaan, BPK RI telah mampu melihat peluang efisiensi dan efektivitas kerja pemeriksaan terhadap LKPP/D dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (*E-Audit*), sehingga kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara rutin oleh BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sebagai bagian dari pilot project atas pelaksanaan *E-Audit* yang telah dicanangkan mulai tahun 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melakukan persiapan-persiapan untuk mendukung tercapainya sasaran *E-Audit* tersebut. Persiapan yang dilakukan diantaranya dengan menyiapkan server khusus untuk pelaksanaan *E-Audit* dan laptop untuk pegawai. Pengadaan laptop dan komputer diperlukan dalam rangka peremajaan laptop dan komputer yang dimiliki menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan suatu kesepakatan antara pihak BPK dan pihak

Auditee baik berupa pemerintah pusat, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

Untuk menilai efektivitas suatu sistem *E-Audit* yang dilakukan oleh auditor pada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam memeriksa laporan keuangan entitas pemerintahan, maka peneliti menggunakan dua variabel bebas untuk menilainya yaitu persepsi kemudahan pengguna atau *perceived easy of use* dan persepsi manfaat atau *perceived usefulness*. Menurut Davis dalam Nindyastuti (2014: 39) Persepsi manfaat atau kegunaan diartikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya baik secara positif maupun negatif bahwa menggunakan teknologi melalui sistem tertentu dapat meningkatkan kinerjanya, sedangkan persepsi kemudahan pengguna diartikan sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan sistem tertentu adalah mudah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nindyastuti (2014) yang Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan berhubungan secara positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem *E-Audit*. Septiningtyas (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan teknologi sistem berpengaruh terhadap variabel kinerja auditor internal, Sedangkan efektivitas penggunaan dan kepercayaan atas teknologi sistem informasi akuntansi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor internal.

Lebih lanjut dalam penelitian Santoso (2013) dimana dalam penelitiannya membuktikan bahwa persepsi pengguna terhadap kemudahan dalam penggunaan IT *Perceived Easy of Use (PEOU)* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi pengguna terhadap kegunaan *Perceived Usefulness (PU)* IT. Santoso (2013) juga menyimpulkan bahwa hal ini dipengaruhi oleh faktor masa kerja responden dan masa implementasi IT. Lebih lanjut Santoso (2013) menyatakan bahwa penggunaan IT yang selama kurang lebih 6 tahun untuk aktivitas kerja harian mereka, dan berdasarkan profil responden, masa kerja responden telah cukup lama, yaitu di atas 5 tahun hingga lebih dari 20 tahun, sedangkan Persepsi pengguna terhadap kegunaan dalam menggunakan IT (PU) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penilaian akan dampak yang dialami oleh seseorang bila menggunakan suatu sistem tertentu dalam pekerjaannya *Attitude (ATT)*. Hal ini disebabkan karena telah cukup lamanya suatu teknologi informasi digunakan pada suatu komunitas akan menjadikan hal tersebut biasa bagi pemakai teknologi informasi. Hal ini dilihat berdasarkan usia pemakai, masa kerja dan tingkat pendidikan serta lamanya sistem digunakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa efektivitas suatu sistem yang baik tergantung pada tingkat keyakinan pengguna pada sistem teknologi tersebut. Dengan keyakinan pengguna pada sistem *E-Audit* khususnya auditor yang diberi tugas dalam mengaudit suatu laporan

keuangan pemerintahan akan mempermudah pekerjaannya baik pada suatu organisasi bisnis maupun sektor publik dalam hal ini auditor yang bekerja di BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo serta meningkatkan pengawasan terhadap penyimpangan bila terjadinya penyelewengan.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Persepsi Kemudahan Pengguna Dan Persepsi Manfaat Terhadap Efektivitas Sistem *E-Audit* (Studi Pada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: BPK sudah menggunakan *E-Audit* namun pengujian belum dilakukan secara efisien, sehingga dibutuhkan suatu keyakinan para pengguna atas kemudahan sistem E-Audit bahwa sistem E-Audit ini akan mempermudah suatu pekerjaan individual dalam hal ini auditor. Itu sebabnya sistem E-Audit ini belum dikatakan efektif sebagaimana yang diharapkan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah persepsi kemudahan pengguna berpengaruh terhadap efektivitas sistem *E-Audit* pada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo?
2. Apakah persepsi manfaat berpengaruh terhadap efektivitas sistem *E-Audit* pada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo?
3. Seberapa besar pengaruh persepsi kemudahan pengguna dan persepsi manfaat berpengaruh terhadap efektivitas sistem *E-Audit* pada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan pengguna terhadap efektivitas sistem *E-Audit* pada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat terhadap efektivitas sistem *E-Audit* pada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi kemudahan pengguna dan persepsi manfaat terhadap efektivitas sistem *E-Audit* pada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian didukung oleh teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dan Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang audit sektor publik yang terkait dengan persepsi kemudahan pengguna, persepsi manfaat dan efektivitas sistem *E-Audit*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pimpinan dan auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo terkait dengan persepsi kemudahan pengguna, persepsi manfaat dan efektivitas sistem *E-Audit* serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.